

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN MASYARAKAT**



**PELAYANAN ADMINISTRASI DESA BERBASIS APLIKASI IT
DI KANTOR DESA SUKAWALI PAKUHAJI TANGERANG**

**TIM PENGUSUL
TAUFIK HARAHAHAP, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI D-III MANAJEMEN PERUSAHAAN
POLITEKNIK TUNAS PEMUDA
TANGERANG
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN
PROGRAM IPI TEK BAGI MASYARAKAT**

Judul : Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Aplikasi IT di Desa Sukawali Pakuhaji Tangerang.

Peneliti/Pelaksana
Nama : Taufik Harahap
Jabatan : Dosen
Program studi : D-III Manajemen Perusahaan

Anggota (1)
Nama Lengkap : Nurjanah
Jabatan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Politeknik Tunas Pemuda

Anggota (2) :
Nama Lengkap : Safirul Huda
Jabatan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Politeknik Tunas Pemuda

Anggota (ke-3) :
Nama Lengkap : Siska Tri Oktaviana
Jabatan : Mahasiswa
Perguruan Tinggi : Politeknik Tunas Pemuda
Biayakeseluruhan : Rp 5.000.000

Mengetahui,
Kaprosdi

Tangerang, Oktober 2022
Ketua Tim Pengusul,

Novi Nurwanto, S.E., M.M.

Taufik Harahap, S.E., M.M.

Mengetahui
Kepala LPPM,

Iswadi, S.Pd., M.Pd.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat merupakan kewajiban setiap perguruan tinggi. Pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu kewajiban tersebut dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Hal ini dilaksanakan berkaitan dengan kepedulian setiap lembaga atau institusi yang bergerak di bidang Pendidikan, khususnya Pendidikan Tinggi dengan mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Sumber daya manusia khususnya di desa sangat penting artinya bagi pembangunan nasional. Potensinya yang sangat optimal perlu dikembangkan dan dipersiapkan agar mampu mengikuti perkembangan era globalisasi.

Sumber daya manusia sangat erat kaitannya dengan tatalaksana administrasi di kelurahan atau desa. memberikan kontribusi yang besar terhadap keberlangsungan lingkungan hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, khususnya wilayah Rajeg Tangerang.

Teknologi selalu dibutuhkan di hampir semua sisi kehidupan manusia. Salah satunya adalah teknologi IT, teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk *e-Government* telah menfokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara massif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi (*acesable*) bagi masyarakat yang menjadi pelanggan (*clients*) dan untuk mempersiapkan pemerintahan ke depan.

TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah proses update yang tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan data di tingkat administratif pengelola pemerintahan.

Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional. Pada pelaksanaannya tidak lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan aparatur dalam mengelola TIK. Data yang tersimpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan tentang teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). *e-Government* menjadi pertimbangan utama bagi organisasi sektor publik yang melakukan perencanaan sistem informasi dalam rangka menyediakan input penting dan memudahkan dalam proses penyusunan perencanaan dan pemantauan dan evaluasi hasil pembangunan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi bagian dari gugusan pembuat layanan dari pemerintah dan semakin besar pengaruhnya pada organisasi, profesional yang bekerja di dalamnya, serta hubungannya dengan publik. Semua rencana kebijakan untuk *e-Government* telah menfokus pada isu-isu operasional internal, pemberian layanan jasa pemerintah dan teknologi itu sendiri yang secara massif dipercayakan pada TIK sebagai instrumen untuk menjadikan pemerintah lebih efektif, lebih bersahabat dan mudah dihubungi (*acesable*) bagi masyarakat yang menjadi pelanggan (*clients*) dan untuk mempersiapkan pemerintahan ke depan. Demikian halnya, semakin besar pula pengaruhnya bagi pembuat kebijakan dan politisi yang sangat gemar pada TIK untuk menyelesaikan masalah pekerjaan administratif yang kompleks dan menangani kasus-kasus yang menonjol seperti perencanaan pembangunan, mobilitas, pembagian barang serta pelayanan publik yang tertunjang (*an affordable care*). (Prins, 2011:11)

TIK dapat menjadi alat untuk memperbaiki administrasi desa. Administrasi desa seperti kita ketahui bersama mempunyai banyak kelemahan diantaranya adalah proses update yang tepat waktu sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan data di tingkat administratif pengelola pemerintahan.

Dukungan TIK yang diterapkan pada pemerintah desa akan mendorong data tunggal yang dengan mudah diupdate oleh aparatur desa dengan mengedepankan kesederhanaan operasional. Pada pelaksanaannya tidak lupa akan pentingnya proses pendampingan untuk memampukan aparatur dalam mengelola TIK. Data yang tersimpan dengan baik sangat mendukung kinerja pemerintah desa sesuai azas efisien dan efektif, pembakuan, akuntabilitas, keterkaitan, kecepatan dan ketepatan, keamanan, ketelitian, kejelasan, singkat dan padat dan logis dan meyakinkan dalam rangka penyusunan perencanaan desa, perbaikan administrasi desa dan pelayanan publik.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Administrasi Desa

Keberadaan sarana Administrasi desa sangat dibutuhkan guna kelancaran kegiatan administrasi desa. Tertib administrasi harus benar-benar dikuasai dan dipahami aparatur di tingkat desa. Mengingat dengan tercapainya tertib administrasi, maka pemerintahan desa mampu memberikan pertanggungjawaban atas semua kegiatan-kegiatan yang dikelola maupun dilaksanakan.

Administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa pada buku Administrasi Desa. Untuk meningkatkan manajemen Pemerintahan Desa perlu dilakukan penataan administrasi agar lebih efektif dan efisien, penataan administrasi merupakan pencatatan data dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Maka perlu dilakukan langkah penyempurnaan terhadap pelaksanaan administrasi. Ada beberapa pengertian lain terkait Administrasi yakni ;

- Administrasi Umum adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan Pemerintahan Desa pada Buku Administrasi Umum di Desa
- Administrasi Penduduk adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk pada Buku Administrasi Penduduk di Desa
- Administrasi Keuangan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan Keuangan Desa pada Buku Administrasi Keuangan di Desa
- Administrasi Pembangunan adalah kegiatan pencatatan data dan informasi pembangunan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan pada Buku Administrasi Pembangunan di Desa.

Berkaitan dengan beberapa hal tersebut saat ini Desa Sukawali Pakuhaji Tangerang dalam melaksanakan setiap kegiatan administrasi desa masih ada yang belum menggunakan alat atau aplikasi IT yang saat ini sudah canggih mereka masih menggunakan alat manual yaitu pencatatan manual dengan menggunakan buku

besar yang sangat riskan dengan kata **Hilang Rusak dan Terbakar**, Oleh karena itu kami dari Politeknik Tunas Pemuda melaksanakan pengabdian masyarakat ke daerah tersebut guna meningkatkan atau menambah wawasan masyarakat sekitar Desa tentang aplikasi IT dalam kegiatan Administrasi Desa.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Dalam program Pengabdian Kepada Masyarakat” yang berjudul “Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Aplikasi IT di Desa Sukawali Pakuhaji Tangerang” ini, metode kegiatan yang digunakan adalah pemberian materi atau penyuluhan tentang cara penggunaan atau aplikasi IT dalam kegiatan administrasi desa, serta pendampingannya kepada masyarakat dan pamong setempat.

3.1. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Memberikan pemahaman dan wawasan kepada masyarakat Desa tentang penggunaan atau aplikasi IT dalam kegiatan administrasi desa,.
2. Membantu pihak Pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat dengan dukungan sumberdaya iptek dan kemampuan pengoperasionalan iptek tersebut.
3. Memberikan kelancaran dan kemudahan bagi aparat desa dalam melakukan pencatatan Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan

3.2 Manfaat

Adapun manfaat penyuluhan tentang Administrasi desa Berbasis Aplikasi IT Dalam Menunjang Kinerja Pemerintahan serta pendampingannya agar:

- a. Administarsi desa dapat berjalan dengan baik
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Mempermudah kegiatan pencatatan dan pemberian rekomendasi kepada warga masyarakat Desa Sukawali
- d. Mengurangi adanya dobel permintaan surat pengantar untuk berbagai pengajuan (KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DII)
- e. Mendapatkan informasi tentang cara dan prosedur aplikasi IT di Desa

3.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan karena beberapa alasan, yakni:

- a. Adanya administrasi desa berupa pelayanan public bagi masyarakat desa Sukawali Pakuhaji Tangerang yang belum terjamah aplikasi IT dalam kegiatan Administrasi Desa
- b. Perlunya pengelolaan sarana dan sumber daya Manuasi guna meningkatkan proses pembangunan di desa setempat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Perlunya memberdayakan sumber daya manusia di desa setempat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dilakukan survey lapangan yang antara lain menemukan adanya ketertinggalan desa dalam kemampuan Sumber Daya Manusianya untuk menggunakan metode atau aplikasi teknologi maju yang saat ini telah banyak di gunakan di desa – desa, dan ternyata di Desa belum mengenal teknologi IT untuk kegiatan administrasi Desa.

Langkah awal diawali dengan program penyuluhan kepada masyarakat dan juga pamong desa setempat mengenai pentingnya administrasi desa yang berbasis IT, fungsi administrasi desa dan perlunya melakukan perbaikan sederhana yang dilanjutkan dengan pendampingan tentang pemeliharaan rutin atas alat yang akan di gunakan yaitu Komputer.

Selama kegiatan ini, pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa khususnya pada usia produktif serta pamong desa setempat. Hingga akhirnya, keseluruhan program pengabdian ini dapat berjalan dengan lancar.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. SURVEY LOKASI

Tahapan awal rangkaian kegiatan pengabdian ini dimulai dengan survey ke lokasi..

2. PENYULUHAN

Kegiatan penyuluhan tentang Administrasi desa Berbasis Aplikasi IT Dalam Menunjang Kinerja Pemerintahan Desa.

Kegiatan penyuluhan dilaksanakan di:

Tempat : Balai Desa

Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2022

Pukul : 09.00 – 12.00 WIB

Jumlah Peserta : 5 orang

Metode Kegiatan : Penyuluhan dan Diskusi/Tanya-Jawab

3. PENDAMPINGAN

Kegiatan pendampingan diberikan sebagai bagian yang terintegrasi dari keseluruhan agenda pengabdian kepada masyarakat ini. Pendampingan meliputi asistensi kegiatan aplikasi komputer pendampingan atas pemeliharaan jaringan komputer secara sederhana.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Kinerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Politeknik Tunas Pemuda sebagai lembaga yang menaungi seluruh kegiatan dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diantaranya adalah :

- a) LPPM menginformasikan setiap informasi pengajuan proposal, baik dari sumber dana Institusi maupun sumber dana Dikti dan cara pengusulannya sesuai dengan panduan DP2M Dikti.
- b) LPPM menyeleksi usulan proposal yang masuk ke LPPM dan yang memenuhi syarat diusulkan ke DP2M Dikti
- c) LPPM mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara melembaga, baik secara administratif maupun keuangan.
- d) LPPM memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan.
- e) LPPM memfasilitasi setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan fasilitas yang tersedia. Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen yang memiliki kepakaran untuk menyelesaikan persoalan mitra dan mahasiswa yang membantu aspek teknis

No	Nama	Status	Tugas dan Kewajiban
1.	Nur Khotijah	Ketua	Mengorganisir kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat,
2	Nurjannah	Anggota 1	Membantu ketua
3	Safirul Huda	Anggota 2	Membantu ketua
4	Siska Tri Oktaviana	Anggota 3	Membantu ketua

BAB V
BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

5.1 ANGGARAN BIAYA

Nomor	Jenis Pengeluaran	Biaya Yang Diusulkan (Rp)
1	Perjalanan	Rp. 1.300.000,-
2	Konsumsi	Rp. 2.000.000,-
3	Bahan habis pakai dan peralatan	Rp. 1.500.000,-
4	Lain-lain(publikasi,seminar,laporan)	Rp. 400.000,-
Total		Rp. 5.200.000,-

5.2.JADWAL

Nomor	Jenis Kegiatan	Bulan					
		5	6	7	8	9	10
1	Persiapan dan survey						
2	Menyusun dan mengajukan proposal						
3	Menyiapkan alat dan bahan						
4	Pelaksanaan kegiatan						
5	Pelaporan						

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilakukan dan memperhatikan dari tinjauan pustaka maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesiapan dalam Penerapatan TIK dalam penyelenggaraan adminisrasi desa secara umum masih dalam tahap persiapan awal, tetapi memiliki potensi yang kondusif untuk dikembangkan lebih lanjut baik di tingkat kabupaten kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.
2. Kesiapan SDM untuk penerapan TIK dalam pelayanan administrasi desa masih kurang. Ada beberapa hal yang menjadi kendala, diantaranya adalah kemampuan SDM dalam penguasaan IT dan belum meratanya SDM baik tenaga ahli maupun operasional. SDM Desa belum siap, baik tenaga ahli maupun operasional, SDM Desa masih dalam tahap mempersiapkan kemampuan SDM baik tenaga ahli maupun operasional.
3. Secara umum dibidang sarana relatif belum siap baik tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dan di bidang prasarana perlu dituntaskan karena sebagian desa belum terjangkau jaringan internet dan telepon seluler. Program aplikasi yang digunakan umumnya belum komprehensif, sistemik dan terintegrasi. Program aplikasi yang ada terkait dengan administrasi kependudukan, sedangkan program aplikasi lainnya belum tersedia atau masih dalam pengembangan. Keberadaan program aplikasi belum terintegrasi dan tersentral di tingkat Desa sehingga efisiensi dan efektifitasnya belum optimal. Sedangkan pemilikan sarana TIK seperti komputer, laptop, LCD, printer di tingkat desa belum memadai, Sedangkan di tingkat desa dan kelurahan belum siap, karena umumnya desa/kelurahan belum memiliki komputer, maupun laptop, dan printer yang memadai.

4. Di bidang Kelembagaan, belum memiliki perlengkapan untuk IT. Hal ini menjadi kendala tersendiri dalam membangun sistem pelayanan publik berbasis TIK yang handal dalam pelayanan publik umumnya, khususnya dalam pelayanan administrasi desa/kelurahan. Sedangkan struktur kelembagaan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan belum sepenuhnya dilakukan pengayaan baik pengembangan struktur maupun fungsinya untuk mendukung terselenggaranya administrasi desa/kelurahan berbasis TIK secara efektif dan efisien.
5. Di bidang Anggaran, komitmen alokasi anggaran dalam APBD dalam pembiayaan penerapat TIK dalam Administrasi Desa/Kelurahan belum memadai. Penggunaan APBD untuk pembiayaan penerapan TIK dalam penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan belum dilakukan
6. Di bidang pelayanan IT, pelayanan masih terbatas dalam pelayanan administrasi kependudukan seperti pengelolaan data penduduk, KTP dan KK. Sedangkan yang lain terkait dokumen persuratan seperti surat keterangan, surat izin, dan beberapa jenis surat lainnya. Karena itu, bidang pelayanan IT masih terbatas dan mendesak dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan efektivitas, efisiensi dan nilai ekonomisnya.

4.2. Saran

1. Pemerintah Kabupaten dapat berperan mendorong, memfasilitasi dan membantu pemerintah kabupate, serta desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa/kelurahan yang terintegrasi, terpadu, terstandarisir dan menyeluruh dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang efektif, efisien dan ekonomis dalam mewujudkan pemerintahan desa/kelurahan yang maju, mandiri dan sejahtera di Desa .
2. Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi desa/kelurahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan menerbitkan Buku Panduan Kebijakan Penerapan TIK dalam Penyelenggraan Administrasi Desa/Kelurahan.

Buku Panduan tersebut sebagai acuan resmi dalam memahami dan pembuatan kebijakan kabupaten yang mencakup peraturan daerah, dan atau peraturan bupati dan keputusan bupati yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Administrasi Desa/Kelurahan berbasis TIK. Kebijakan tersebut mencakup pengaturan yang menyeluruh terkait tatalaksana administrasi desa/kelurahan berbasis TIK, yang meliputi: berbagai pengertian umum yang menyangkut TIK, tujuan penyelenggaraan administrasi Desa berbasis TIK, ruang lingkup pelayanan administrasi desa/kelurahan berbasis TIK, institusi pemerintah dibawah naungan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi desa berbasis TIK, fungsi dan tugas pokok masing-masing institusi tersebut, penyelenggaraan kerjasama kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam melengkapi kebutuhan prasarana TIK, rekrutment dan pengembangan SDM bidang TIK, bantuan pengadaan sarana TIK bagi desa dan kelurahan yang APBDes-nya tidak memadai, mekanisme dan prosedur pemberian pelayanan setiap jenis kegiatan pelayanan administrasi desa, proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pengembangan penyelenggaraan administrasi desa/kelurahan berbasis TIK dan sanksi pelanggaran. Dengan panduan ini diharapkan adanya standarisasi isi kebijakan dan penyelenggaraan sistem pelayanan administrasi desa/ kelurahan berbasis TIK di kabupaten . Dengan demikian akan tercipta landasan pengintegrasian *database* dan sistem pelaporan data elektronik di Desa Sukawali Pakuhaji Tangerang. terkait penyelenggaraan administrasi desa dan pengembangan pelayanan publik berbasis TIK di tingkat propinsi yang datanya bersumber dari administrasi desa.

3. Memfasilitasi pembuatan dan pengelolaan program aplikasi sistem pelayanan administrasi desa/kelurahan yang menyeluruh, terintegrasi dan tersentral di Kabupaten . berbasis web beserta panduan penggunaannya secara *online* sehingga dapat diakses oleh setiap pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang mencakup

administrasi kependudukan, pelayanan dokumen sipil (seperti KTP, KK, akte kelahiran, nikah, talak, rujuk, dan lain-lain), sistem Keuangan dan Anggaran desa, administrasi SDM Desa, Sistem Pengelolaan Data Monografi, sistem komunikasi dan ketatausahaan pemerintahan desa, sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa, sistem pelayanan balita (bayi usia lima tahun) dan waula (warga usia lanjut) dan paket-paket program aplikasi lain yang dipandang perlu. Dengan cara demikian dapat terfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa yang efektif, efisien dan ekonomis.

4. Memberikan bantuan pelatihan kader-kader fasilitator di setiap kabupaten/kota yang menjadi tempat bertanya langsung maupun *online* dalam pengoperasionalkan setiap program aplikasi dalam sistem pelayanan administrasi desa/kelurahan berbasis TIK dan permasalahan yang dijumpai dalam menjalankan program aplikasi. Dengan program ini, para staf dapat menyelesaikan berbagai kesulitan yang ditemui dalam menjalankan program aplikasi dengan cepat. Dengan demikian sistem yang dibangun segera dapat bekerja secara efektif dan efisien.
5. Menyusun program kampanye dan kerjasama dengan pemerintah kabupate dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi desa/kelurahan terintegrasi, terpadu dan menyeluruh menuju tatanan administrasi desa/kelurahan yang maju, efektif, efisisen dan ekonomis dalam memberika pelayanan prima kepada masyarakat untuk memperkokoh posisi Kabupaten sebagai provinsi teladan, terdepan dan terbaik di Indonesia.

Foto-Foto Kegiatan

